

**KAJIAN DAMPAK SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN  
BERBASIS MASYARAKAT LESTARI (PHBML) TERHADAP  
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

**(Studi Kasus Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari,  
Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Tesis  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-2 pada  
Program Studi Ilmu Lingkungan**

**Nur Rohman  
L4K009010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**TESIS**

**KAJIAN DAMPAK SERTIFIKASI PHBML TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN  
RAKYAT (STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT OLEH KOPERASI  
WANA MANUNGGAL LESTARI, GUNUNG KIDUL,  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

**Disusun oleh:**

**Nur Rohman**  
*LAK009010*

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES**

**Dr. Tukiman Taruna**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Lingkungan**

**Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KAJIAN DAMPAK SERTIFIKASI PHBML TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT (STUDI KASUS PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT OLEH KOPERASI WANA MANUNGGAL LESTARI, GUNUNG KIDUL, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

**Disusun oleh:**

**Nur Rohman**  
***L4K009010***

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 27 Agustus 2010  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

Tanda tangan,

Ketua,

Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES

.....

Anggota,

1. Dr. Tukiman Taruna

.....

2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA

.....

3. Dr. Ir. Sri Puryono, KS., MP

.....

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Magister Ilmu Lingkungan seluruhnya adalah merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2010

**Nur Rohman**  
**NIM. L4K009010**

## **BIODATA PENULIS**



Nur Rohman lahir di Boyolali pada tanggal 09 Juli 1980, sebagai putra pertama dari (Alm) Bapak Abdul Madjid dan (Almh) Ibu Marliyah.

Pendidikan dasar ditempuh di MIM 04 Cangkringan, dan selesai pada tahun 1992, sedangkan pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri 1 Banyudono dan SMA Negeri 1 Boyolali yang berturut-turut diselesaikan pada tahun 1995 dan 1998.

Gejar kesarjanaan Strata 1 Kehutanan diraih pada bulan Juli tahun 2004 pada Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, Penulis bekerja di Balai Taman Nasional Betung Kerihun, Kalimantan Barat sebagai Pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH). Berbagai pengalaman training dan seminar ilmiah khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat pernah diikuti. Pada tahun 2009 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang dengan mendapat dukungan beasiswa dari Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana–Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas).

Penulis telah dikaruniai dua orang putra dan putri bernama Muhammad Fatih Rohmani dan Alifa Nur Muttaqinah buah perkawinannya dengan Asna Hidayati.

**Penulis**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan mengambil judul “Kajian Dampak Sertifikasi PHBML terhadap Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Rakyat Oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul, Prov. DIY)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES, sebagai Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan dan masukannya selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dr. Tukiman Taruna sebagai Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan masukannya selama proses penyusunan Tesis ini.
3. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro beserta seluruh dosen pengajar dan staf administrasi.
4. Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pusbindiklatren – Bappenas) atas kesempatan belajar dan beasiswa yang diberikan.
5. Pengurus Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul dan pengelola hutan rakyat di tingkat desa (paguyuban) dan Tingkat Dusun (KTHR) di Desa Girisekar, Desa Dengok dan Desa Kedungkeris serta anggota kelompoknya, atas segala bantuannya.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Gunungkidul, Pimpinan LSM Arupa, LSM Perhimpunan Shorea dan PKHR, serta PT. Djawa Furni, Yogyakarta yang telah memberikan bantuan moral dan material selama pengambilan data lapangan.
7. Kawan-kawan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Angkatan 24 atas kekompakan dan semangatnya.
8. Semua pihak yang telah membantu proses penelitian dan penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca serta semua pihak yang berkenan.

Semarang, Agustus 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
BIODATA PENULIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Originalitas Penelitian.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	9
2.2 Landasan Operasional .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tipe Penelitian .....	38
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.3 Lokasi Penelitian .....	40
3.4 Variabel Penelitian .....	42
3.5 Instrumen Penelitian.....	43
3.6 Jenis dan Sumber Data .....	44
3.7 Teknik Sampling dan Pengumpulan Data.....	46
3.8 Metode Analisis Data .....	54
3.9 Interpretasi Dan Presentasi Keluaran Dari Analisis Data .....	55
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	56
4.2 Karakteristik Sosial Ekonomi Anggota Kelompok.....	67
4.3 Karakteristik Pengelolaan Hutan Rakyat .....	71
4.4 Kondisi kelembagaan pengelola hutan rakyat .....	77
4.5 Dampak Sertifikasi .....	86
4.6 Faktor yang mempengaruhi dampak sertifikasi.....	113
4.7 Analisis keberlanjutan Sertifikasi.....	133
4.8 Usulan pengelolaan .....	138

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan .....	146
5.2 Rekomendasi.....	147
BAB VI. RINGKASAN.....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	152
LAMPIRAN .....	157



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Referensi Penelitian terkait .....	8
Tabel 2. Perbedaan antara skema sertifikasi FSC dan LEI .....	16
Tabel 3. Kebutuhan Data penelitian .....	45
Tabel 4. Jumlah sampel penelitian .....	47
Tabel 5. Indikator data sosial ekonomi anggota UMHR .....	50
Tabel 6. Indikator karakteristik pengelolaan hutan rakyat.....	50
Tabel 7. Indikator data kelembagaan hutan rakyat.....	51
Tabel 8. Klasifikasi penilaian analisis kelembagaan.....	52
Tabel 9. Indikator Pengukuran Dampak Ekonomi.....	52
Tabel 10. Indikator dampak sosial .....	52
Tabel 11. Kode kelas penutupan lahan .....	53
Tabel 12. Metode analisis yang digunakan.....	43
Tabel 13. Tataguna lahan desa Girisekar.....	56
Tabel 14. Tataguna Lahan Desa Dengok.....	59
Tabel 15. Tata Guna Lahan di Desa Kedungkeris.....	61
Tabel 16. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian.....	63
Tabel 17. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Penelitian.....	63
Tabel 18. Kondisi Pengelolaan Hutan Rakyat Sertifikasi.....	64
Tabel 19. Potensi Hutan rakyat sertifikasi Kabupaten Gunungkidul.....	66
Tabel 20. Karakteristik Pengelolaan Hutan Rakyat Sebelum Sertifikasi.....	71
Tabel 21. Karakteristik pengelolaan hutan rakyat sesudah sertifikasi .....	74
Tabel 22. Analisa perubahan karakteristik pengelolaan hutan rakyat.....	76
Tabel 23. Sejarah Pengelolaan Hutan Rakyat di Girisekar.....	77
Tabel 24. Sejarah Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Dengok.....	78
Tabel 25. Sejarah Pengelolaan Hutan Rakyat Desa Kedungkeris.....	79
Tabel 26. Pembagian Fungsi Lembaga Pengelola Hutan Rakyat.....	81
Tabel 27. Perbandingan kelembagaan sebelum dan sesudah sertifikasi .....	85
Tabel 28. Kenaikan harga kayu yang dirasakan anggota UMHR .....	86
Tabel 29. Prosentase kenaikan harga kayu sertifikasi.....	87
Tabel 30. Pendapatan rata-rata anggota UMHR per bulan.....	87
Tabel 31. Pengaruh jual beli kayu terhadap ekonomi masyarakat .....	88
Tabel 32. Kenaikan harga penjualan kayu sertifikasi KWML .....	88
Tabel 33. Keuntungan Jual beli Kayu sertifikasi KWML .....	89
Tabel 34. Kegiatan usaha yang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat ...	90
Tabel 35. Pengaruh KUB terhadap ekonomi masyarakat .....	91
Tabel 36. Pengaruh Homestay terhadap Ekonomi Masyarakat.....	91
Tabel 37. Kegiatan usaha yang memberikan input untuk kelompok .....	92
Tabel 38. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat .....	95
Tabel 39. Jumlah Kunjungan ke UMHR* s/d 2010 .....	96
Tabel 40. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Girisekar tahun 2006.....	99
Tabel 41. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Girisekar tahun 2009.....	99

Tabel 42. Perubahan tutupan lahan Desa Girisekar .....	99
Tabel 43. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Dengok tahun 2006.....	102
Tabel 44. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Dengok tahun 2009.....	102
Tabel 45. Perubahan tutupan lahan Desa Dengok.....	103
Tabel 46. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Kedungkeris tahun 2009.....	106
Tabel 47. Tutupan lahan lokasi penelitian Desa Kedungkeris tahun 2009.....	106
Tabel 48. Perubahan tutupan lahan Desa Kedungkeris.....	107
Tabel 49. Perubahan penutupan lahan lokasi hutan rakyat sertifikasi tahun 2006 dan tahun 2009 .....	110
Tabel 50. Hubungan tutupan lahan hutan dengan erosi .....	111
Tabel 51. Hasil skoring Terhadap Lembaga Pengelola Hutan Rakyat .....	115
Tabel 52. Peran aktif lembaga pendukung hutan rakyat .....	120
Tabel 53. Penjualan Kayu Sertifikasi KWML .....	127
Tabel 54. Pemasaran furniture PT. Jawa Furni ke luar negeri tahun 2009 .....	128
Tabel 55. Sebaran pembelian kayu oleh KWML per dusun .....	131
Tabel 56. Analisis ekonomi sertifikasi .....	134
Tabel. 57 analisis keberlanjutan sertifikasi dari aspek ekonomi .....	135
Tabel 58. Kondisi eksisting aspek sosial .....	136
Tabel 59. Analisis keberlanjutan sertifikasi dari aspek sosial .....	136
Tabel 60. Permasalahan Pengelolaan Hutan Rakyat.....	139
Tabel 61. Kondisi internal dan eksternal pengelolaan hutan rakyat .....	140
Tabel 62. Alternatif kebijakan pengelolaan hutan rakyat .....	141
Tabel 63. Rancangan implementasi kebijakan .....	144
Tabel 64. Rancangan evaluasi .....	145

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Sebaran unit manajemen hutan bersertifikat LEI .....	20
Gambar 2. Alur Pemikiran Penelitian.....	39
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian kabupaten Gunungkidul .....	41
.....	
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian Desa Girisekar .....	58
Gambar 5. Peta Lokasi Penelitian Desa Dengok.....	60
Gambar 6. Peta Lokasi Penelitian Desa Kedungkeris .....	62
Gambar 7. Sebaran Umur Anggota UMHR .....	67
Gambar 8. Tingkat Pendidikan Anggota UMHR.....	68
Gambar 9. Sebaran Pendapatan anggota UMHR.....	68
Gambar 10. Persepsi anggota UMHR terhadap sertifikasi.....	69
Gambar 11. Ketaatan anggota UMHR untuk melaporkan penebangan.....	70
Gambar 12. Kelembagaan Pengelolaan Hutan Rakyat .....	84
Gambar 13. Peningkatan kapasitas Anggota UMHR.....	93
Gambar 14. Jumlah anggota UMHR yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas .....	94.
Gambar 15. Peta pentupan lahan Desa Girisekar tahun 2006 .....	100
Gambar 16. Peta pentupan lahan Desa Girisekar tahun 2009 .....	101
Gambar 17. Peta pentupan lahan Desa Dengok tahun 2006.....	104
Gambar 18. Peta pentupan lahan Desa Dengok tahun 2009.....	105
Gambar 19. Peta pentupan lahan Desa Kedungkeris tahun 2006.....	108
Gambar 20. Peta pentupan lahan Desa Kedungkeris tahun 2009.....	109
Gambar 21. Jumlah masyarakat yang merasakan perubahan lingkungan .....	112
Gambar 22. Tingkat keaktifan anggota UMHR .....	113
Gambar 23. Lembaga Pendukung Pengelolaan Hutan Rakyat .....	120
Gambar 24. Sistem pemasaran kayu sertifikasi.....	126

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
Lampiran 1. Kuesioner/draft wawancara anggota kelompok .....	157
Lampiran 2. Draft Wawancara kelompok .....	160
Lampiran 3. Draft wawancara lembaga pendukung .....	161
Lampiran 4. Hasil Kuesioner kondisi sosial ekonomi anggota UMHR Desa Girisekar .....	162
Lampiran 5. Hasil Kuesioner kondisi sosial ekonomi anggota UMHR Desa Dengok .....	164
Lampiran 6. Hasil Kuesioner kondisi sosial ekonomi anggota UMHR Desa Kedungkeris .....	166
Lampiran 7. Hasil Kuesioner dampak sertifikasi Desa Girisekar .....	168
Lampiran 8. Hasil Kuesioner dampak sertifikasi Desa Dengok .....	170
Lampiran 9. Hasil Kuesioner dampak sertifikasi Desa Kedungkeris .....	172

## ABSTRAK

### **Kajian Dampak Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) terhadap Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus Pengelolaan Hutan Rakyat oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Oleh: Nur Rohman**

Deforestasi dan degradasi lahan telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya kesalahan pengelolaan kawasan hutan. Di sisi lain, masyarakat dengan pola pengelolaan hutan rakyat, mampu menjaga kelestarian hutan. Sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif lokal dalam mengelola hutan secara lestari, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) memberikan sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) kepada unit manajemen hutan rakyat lestari. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah, apakah pemberian sertifikasi PHBML mampu memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan rakyat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sertifikasi PHBML terhadap pengelolaan hutan rakyat ditinjau dari aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungan.

Penelitian ini dilakukan di 3 desa yaitu Desa Girisekar, Desa Dengok dan desa Kedungkeris. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan responden dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan kuesioner. kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif maupun kualitatif.

Pemberian sertifikasi PHBML memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebesar 1,94%, peningkatan kapasitas masyarakat sebesar 52,76% dan peningkatan tutupan hutan sebesar 3,38%. Faktor-faktor yang berpengaruh adalah partisipasi aktif anggota UMHR, keaktifan lembaga pengelola hutan, tingkat pemasaran produk sertifikasi dan dukungan stakeholder. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pemberian sertifikasi belum menguntungkan secara ekonomi. Akan tetapi pemberian sertifikasi menguntungkan secara sosial dan lingkungan

Untuk memperoleh pengelolaan hutan rakyat sertifikasi yang berkelanjutan, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas masyarakat disertai penyediaan lapangan kerja, meningkatkan sosialisasi mekanisme jual beli kayu sertifikasi, meningkatkan kemampuan administrasi dan manajerial pengurus, meningkatkan koordinasi yang intensif terhadap anggota UMHR dan menerapkan prinsip-prinsip silvikultur dalam pengelolaan hutan rakyat. Selain itu, dukungan dari stakeholder berupa pengembangan pasar, penyuluhan dan pendampingan dan input teknologi baru, sangat diharapkan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.

***Kata kunci: hutan rakyat, sertifikasi, dampak, ekonomi, sosial, lingkungan***

## ABSTRACT

### **Study of Sustainable Community-Based Forest Management (PHBML) Certification Impact for Private Forest Management (Case Study on Private Forest Management by Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul, Special Territory of Yogyakarta Province)**

**By: Nur Rohman**

Deforestation and land degradation has caused the deterioration of environmental quality in Indonesia. This was due to mismanagement of forest area. On the other hand, communities with forest management scheme, capable of preserving the forest. As a form of respect for local initiative in managing forests sustainably, Indonesian Ecolabelling Institute (LEI) provides certification of Sustainable Community-Based Forest Management (PHBML) to sustainable forest management units. The next question to be answered is whether the granting of certification PHBML able to provide the impact on forest management. Therefore, this study aims to determine the impact of forest management certification PHBML against people in terms of economic aspects, social aspects and the environment.

This research was conducted in three villages namely Girisekar, Dengok and Kedungkeris Villages. Type of research is descriptive by combining qualitative and quantitative approaches. The respondents was selected by simple random sampling method. Primary data collected by observation, depth interviews, and questionnaires. Then, the data were analyzed with descriptive methods, both quantitatively and qualitatively.

PHBML certification provides a positive impact on increasing public revenue amounted to 1.94%, increase community capacity by 52.76% and increase the forest cover of 3.38%. Factors that influence the certification impact are the active participation of members UMHR, liveliness of forest management institutions, marketing of private forest product and stakeholder support. Based on the analysis undertaken, it is known that the granting of certification is not economically profitable. But from social and environmental aspect, the granting of certification is beneficial.

In order to obtain the management of sustainable forest certification, which needs to be done is to increase community capacity accompanied by the provision of employment opportunities, increase the dissemination mechanism of buying and selling of timber certification, enhancing managerial capabilities and administrative management, enhancing intencive coordination of member UMHR and apply the principles of silviculture in private forest management. In addition, the support of stakeholders such as market development, counseling and assistance and input of new technologies, is expected in order to support sustainable forest management.

***Keywords: forestry, certification, impact, economic, social, environmental***

**BAB I**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### 1.1.1. Deforestasi di Indonesia

Kerusakan hutan (deforestasi dan degradasi) sudah menjadi fenomena umum dan terjadi di semua negara yang memiliki sumberdaya hutan. Indonesia merupakan salah satu negara, di mana sumberdaya alam hutannya telah tereksploitasi sejak zaman kolonial hingga abad milenium ini. Hutan tropis Negara Indonesia kondisinya memprihatinkan dan mengalami proses deforestasi 2,83 juta ha per tahun pada periode 1997-2000 (Kaban, 2006 dalam Awang, 2009). Menurut data dari Departemen Kehutanan, luas hutan Indonesia saat ini sebesar 138 Juta ha, dengan laju deforestasi nasional dalam 10 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 1,7 juta hektar per tahun. Penyebab deforestasi tersebut selain dari melanjutkan kerja-kerja eksploitasi HPH seperti pada rezim Orde Baru, juga ditambah dengan maraknya kegiatan penebangan haram (*illegal logging*) sejak tahun 1999, pembukaan lahan untuk usaha tani perkebunan rakyat dan perkebunan swasta, kebakaran hutan, dan perebutan kekuasaan atas lahan hutan antara perusahaan HPH dengan masyarakat adat (Awang, 2009).

Sepuluh tahun terakhir ini pengelolaan hutan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, dalam hal ini ditandai oleh terjadinya perpindahan kekuasaan politik dan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sektor kehutanan yang juga berkehendak mendorong desentralisasi tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang untuk melaksanakannya. Lahirnya PP No. 38/2007 yang mengatur kewenangan sektor kehutanan belum juga dapat menjamin terwujudnya *good forestry governance*. Sebaliknya, pembagian kewenangan ini telah memunculkan kecenderungan untuk menyalahgunakan kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan dan korupsi di daerah semakin nampak pada era otonomi ini oleh pejabat-pejabat publik (Kadir, 2001; Nurdjana *et al.*, 2005 dalam Awang, 2009). Penyalahgunaan wewenang otonomi daerah

yang berlebihan disektor kehutanan telah menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Hal ini menjadi bukti bahwa desentralisasi pengelolaan hutan belum menjamin peningkatan manfaat bagi masyarakat dan perbaikan kualitas pengelolaan hutan berkelanjutan. Muncul keinginan keras agar semua aspek pengaturan dan pemanfaatan hutan, termasuk konservasi, harus diserahkan pada tingkat kabupaten perlu dikaji secara cermat dan hati-hati. Kebijakan pemberian ijin pemanfaatan hutan kepada koperasi seluas 100 ha tanpa ada pembinaan dan pengawasan dari pihak instansi kehutanan mengancam terjadinya perluasan kerusakan hutan (Resosudarmo dan Dermawan, 2003 dalam Awang 2009). Menurut beberapa penelitian yang terkait dengan ijin 100 ha ini, ternyata yang mendapat keuntungan terbesar adalah mereka yang memberi modal yang berada di belakang kelompok masyarakat yang memperoleh ijin. Berbagai bentuk Peraturan Daerah belum mampu menjamin kelestarian sumberdaya hutan (*Sustainable Forest Management* = SFM) di era otonomi daerah. Apapun kebijakan yang dibuat pada rezim pemerintahan saat ini, kerusakan dan konversi (deforestasi) hutan masih berjalan terus terutama karena adanya perluasan perkebunan sawit, dan konversi hutan alam untuk penggunaan lainnya. Akhir-akhir ini ada petunjuk kuat bahwa eks areal HPH yang rusak di Sumatera mulai dikuasai atau dalam proses dikuasai oleh konglomerat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan pemerintah yang lebih banyak menguasai hutan pada pihak swasta. Akibatnya konflik horisontal dalam masyarakat tidak terelakkan. Sedang potensi masyarakat, secara sistematis dimarginalkan. Dengan semakin meningkatnya tekanan sosial dan penambahan penduduk, pada akhirnya pengelolaan yang dilakukan tidak dapat menjamin kelestarian hutannya (dalam pengertian *timber resource*).

### **1.1.2. Pengelolaan Hutan Rakyat**

Oleh banyak kalangan, pengelolaan hutan yang dilakukan oleh swasta (perusahaan) dinilai belum/ tidak memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian secara utuh. Ini diindikasikan dari banyaknya kerusakan hutan yang



diakibatkan pengelolaan hutan tersebut. Satu bentuk pengelolaan hutan lain yang mulai dilirik adalah pemerintah untuk menopang industri kehutanan adalah pengelolaan hutan rakyat. Saat ini pasokan bahan baku industri dari hutan alam semakin berkurang, sehingga kekurangannya dapat dipenuhi dari pembuatan hutan tanaman yang salah satunya melalui pembangunan hutan rakyat. Dari hutan rakyat dapat diperoleh manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung seperti peningkatan produktivitas lahan, pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan sumber bahan baku industri, sedangkan manfaat tidak langsung berupa kelestarian fungsi ekologi seperti pengaturan tata air, udara bersih, erosi terkendali, dan lain-lain.

Dalam pengelolaan hutan, sejak dulu masyarakat telah menunjukkan kearifan lokal (*indigenous knowledge*) yang menjadi bagian terpenting dalam melanjutkan upaya melestarikan alam, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Pengetahuan asli masyarakat tentang hutan tidak lagi dipandang sebagai takhayul, namun masyarakat telah mengajarkan kepada semua orang melalui kerendahan hati, kebijaksanaan tindakan mereka pada alam, dan kebutuhan untuk saling belajar pada kehidupan masyarakat. Banyak klaim tentang pengetahuan ilmiah oleh para ahli pengetahuan yang "*non indigenous knowledge perspectives*", ternyata membawa banyak masalah, dan sementara itu pengetahuan "masyarakat lokal" yang tradisional justru membawa solusi bagi kehidupan masyarakat (Awang, 2009).

Di desa-desa, petani umumnya menunjukkan sedikit minat pada kayu dan hanya melakukan pemanenan kayu jika menghadapi keadaan tertentu yang disebut filosofi "tebang butuh". Mereka memperlakukan hutan sebagai aset jangka panjang, seperti rekening bank yang bisa diuangkan sewaktu-waktu. Pendorong utama untuk melanjutkan penanaman hutan adalah kepentingan komersial, meski tidak bisa dipungkiri nilai-nilai ekologis juga dirasakan. Petani sangat memahami nilai sebenarnya hutan mereka, sehingga mereka terus menjaganya (Hinrichs dkk, 2008). Adanya pengelolaan hutan rakyat, secara langsung maupun tidak langsung telah diakui memberi dampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan di

sekitarnya. Dalam arti yang lebih luas, pengelolaan hutan oleh rakyat, memberikan jaminan kepada masyarakat atas akses dan kontrol terhadap sumber daya hutan untuk penghidupan mereka di dalam dan di sekitar kawasan hutan, dimana mereka bergantung terhadapnya secara ekonomi, sosial, kultural dan spiritual.

### **1.1.3. Dampak Sertifikasi PHBML**

Sampai dengan tahun 2009, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) telah mengeluarkan sembilan PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari) di Indonesia. Dalam proses sertifikasi atas lahan-lahan ini, didukung oleh donor melalui keterlibatan para promotor yang terdiri dari LSM lokal dan organisasi sektor swasta. Salah satunya adalah sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) yang diberikan oleh LEI kepada Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) Gunung Kidul pada tahun 2006. Koperasi ini merupakan wadah dari tiga kelompok hutan rakyat yang ada di tiga desa, yaitu desa Kedung Keris Kecamatan Playen, Desa Dengok Kecamatan Playen, dan Desa Giri Sekar, Kecamatan Panggang. Dalam pengajuan sertifikasi, ketiga kelompok tersebut, didampingi oleh tiga organisasi yang berbeda yaitu, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) mendampingi kelompok di Desa Kedung Keris, LSM Shorea, mendampingi kelompok di desa Dengok, dan LSM ARUPA, mendampingi kelompok di desa Giri Sekar.

Pemberian sertifikasi pada Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML) Gunung Kidul, diharapkan akan memberi dampak positif terhadap pengelolaan hutan rakyat, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Hal ini penting untuk menaksir tingkat keberhasilan atau kegagalan sertifikasi serta jika ada kejelasan pengertian tentang harapan apa yang seharusnya (dan tidak seharusnya) disampaikan (Nussbaum dkk, 2006).

Dengan melihat pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemberian sertifikasi secara teori mendukung pencapaian SFM. Akan tetapi masih perlu dikaji apakah pemberian sertifikasi PHBML akan memberikan dampak terhadap pengelolaan hutan rakyat sertifikasi yang dikelola oleh Koperasi Wana Manunggal Lestari (KWML). Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana sertifikasi mempengaruhi pengelolaan hutan rakyat.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh Unit Manajemen Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul?
- b. Bagaimana dampak sertifikasi terhadap pengelolaan hutan rakyat ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan?
- c. Bagaimana strategi pengelolaan hutan rakyat sertifikasi di masa yang akan datang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gambaran pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh Unit Manajemen Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul.
- b. Mengkaji dampak sertifikasi terhadap aspek, ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pengelolaan hutan rakyat oleh Unit Manajemen Koperasi Wana Manunggal Lestari, Gunungkidul.
- c. Memberikan usulan pengelolaan hutan rakyat sertifikasi di masa yang akan datang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Hasil dari penelitian ini akan mengembangkan teori-teori mengenai pengelolaan hutan rakyat khususnya pada kajian dampak sertifikasi.

- b. Bagi stakeholder pengelolaan hutan rakyat (pemerintah, pendamping, pasar, dll)  
Memberikan gambaran kepada berbagai pihak mengenai pengelolaan hutan rakyat yang telah mendapatkan sertifikasi sehingga dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan kegiatan lebih lanjut.
- c. Bagi pengelola hutan rakyat  
Memberikan masukan kepada unit manajemen dalam pengelolaan hutan rakyat agar lebih optimal.
- d. Bagi penulis
  - Memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan hutan rakyat khususnya dalam penerapan sertifikasi dan peranannya dalam proses pemberdayaan masyarakat.
  - Memberikan kontribusi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

### **1.5. Originalitas Penelitian**

Penelitian tentang dampak sertifikasi terhadap pengelolaan hutan rakyat belum pernah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian penelitian ini merupakan yang pertama kali. Berikut ini beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan.